

Artikel : [Akses terbuka/Open Access](#)

PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Pada Kabupaten/Kota diNusa Tenggara Timur)

Sitasi : Jewaru & Meilawijaya. 2024, JSTAR 4(2), 55-68.

Kronologi naskah.

Submit : 4 November 2024

Revisi : 27 Desember 2024

Diterima : 27 Desember 2024



Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk
Indonesia Maju

REFORMASI BIROKRASI



PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

(Studi Pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur)

Dyonisius H S Jewaru¹, Alfira Meilawijaya²

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, Indonesia

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat, Indonesia

✉ korespondensi author: dyo.jewaru@bps.go.id¹, alfirameila@bps.go.id²

Abstract

This research is designed to offer empirical evidence on how gender inequality affects per capita economic growth in the regencies and municipality within East Nusa Tenggara Province (NTT). This study utilizes secondary data from Statistics Indonesia (BPS), which consists of annual data from 22 regencies and municipality in NTT for the years 2018 to 2022. Descriptive quadrant analysis and panel data regression with fixed effects models and robustness checks were carried out to estimate the research model. The results suggest that gender inequality hinders the per capita growth of Gross Regional Domestic Product (GRDP) in the regencies and cities of NTT. More specifically, gender equality in labor participation, education, and the economy plays a crucial role in stimulating GRDP growth.

Keyword: Gender Inequality, Economic Growth, Labor Participation, Education, Economy

1. Pendahuluan

Isu ketimpangan gender menjadi perhatian serius dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-5 “*Gender Equality*” (United Nations, 2015). Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kesetaraan gender merupakan faktor penting yang mendasari tercapainya pertumbuhan

sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (Yildiz, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Woetzel dkk. (2018) mengungkapkan bahwa pemberdayaan perempuan di negara-negara Asia Pasifik berpotensi menambah 4,5 triliun USD pada Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025 atau setara dengan peningkatan sebesar 12 persen dari skenario *baseline*. Di sisi lain, menurut World Bank (2020), pengurangan ketimpangan gender dalam angkatan kerja Indonesia

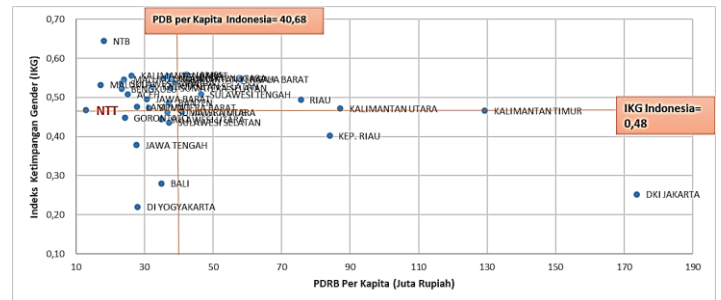
diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 9 persen pada tahun 2025.

Tantangan dan permasalahan ketimpangan gender masih dihadapi Indonesia selama tahun 2018-2022. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya Indeks Ketimpangan Gender (IKG), penurunan IKG yang melambat dan disparitas IKG antar wilayah. BPS (2023a) merilis IKG Indonesia tahun 2022 sebesar 0,46. IKG Indonesia lebih tinggi dari IKG kawasan *East Asia and the Pacific*, yaitu sebesar 0,34 (UNDP, 2023). Selain itu, Penurunan IKG Indonesia relatif melambat dan kesenjangan antar provinsi semakin lebar (BKF, 2022). Masalah ketimpangan gender tersebut juga dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masalah ketimpangan gender di NTT ditunjukkan oleh penurunan IKG yang melambat selama tahun 2018-2022, bahkan mengalami staganasi pada level 0,44 selama tahun 2021-2022 (BPS NTT, 2023). Sementara itu, NTT juga mengalami masalah pertumbuhan ekonomi per kapita selama tahun 2018-2022. Menurut data BPS (2023c), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita NTT tercatat sebagai yang terendah di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan PDRB per kapita NTT menunjukkan tren kontraksi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tumbuh sebesar 3,98 persen, namun angka tersebut turun menjadi 1,57 persen pada tahun 2022. Sebaran provinsi di Indonesia menurut IKG dan PDRB per

kapita ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1. Sebaran provinsi di Indonesia berdasarkan rata-rata IKG dan PDRB per Kapita, 2018-2022



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Altuzarra dkk. (2021) membuktikan signifikansi hubungan empiris antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi di kawasan negara berkembang.

Berbagai penelitian di negara berkembang menghasilkan temuan yang bervariasi mengenai pengaruh ketimpangan gender di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik terhadap pertumbuhan PDB per kapita. Dollar dan Gatti (1999) menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan berdampak pada pemanfaatan sumber daya manusia yang kurang optimal sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian lainnya mengungkapkan bahwa ketimpangan gender dapat menjadi katalisator perekonomian suatu negara (Barro & Lee, 1996). Hubungan negatif antara tingkat pendidikan perempuan dan pertumbuhan ekonomi sebagian besar dapat dijelaskan oleh dampak pendidikan perempuan terhadap tingkat kesuburan, yang berpotensi

mengurangi ketersediaan sumber daya manusia di generasi berikutnya (Klasen & Lamanna, 2009).

Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pasar tenaga kerja sejalan dengan pengaruhnya dalam bidang pendidikan (Bali moune, 2007). Namun, beberapa penulis membuktikan bahwa dalam industri berfokus ekspor, rendahnya upah angkatan kerja perempuan dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan daya saing negara. Hal ini akan mengakselerasi ekspor dan memacu investasi dengan mengoptimalkan profitabilitas produsen. Peningkatan ekspor dan investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Busse dan Spielmann, 2006). Sementara itu, ketimpangan gender dalam keterwakilan politik kelembagaan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Jayasuriya & Burke, 2013; Cabeza, Del brio, & Oscanoa, 2018). Hal ini dikarenakan laki-laki relatif lebih korup dibandingkan perempuan (Dollar & Kraay, 2003; Swamy dkk., 2001).

Penelitian empiris pada level regional di Indonesia, termasuk di NTT, terkait pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas dan menunjukkan hasil yang berbeda (Arifin, 2020; Deris & Nuryadin, 2022; Pertiwi dkk., 2021). Sebagian besar penelitian yang ada juga memiliki beberapa kelemahan karena tidak melakukan *robustness check* untuk hasil empiris yang *reliable* dan tidak mencakup periode terkini. Dengan

demikian, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan bukti empiris apakah ketimpangan gender menghambat pertumbuhan ekonomi per kapita kabupaten/kota di NTT. Penelitian ini disajikan dalam 4 bagian, yaitu pendahuluan (bagian 1), metodologi yang mencakup bahan dan sumber data, serta metode analisis (bagian 2), hasil dan pembahasan yang mencakup gambaran dan pengaruh ketimpangan gender terhadap PDRB per kapita kabupaten/kota di NTT (bagian 3), dan pada bagian terakhir (bagian 4) disajikan simpulan dan saran.

2. Metodologi

Bahan dan Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian empiris yang mencakup kabupaten/kota di Provinsi NTT. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diolah terdiri dari data tahunan 22 kabupaten/kota di NTT dalam periode 2018-2022 (lima tahun), yang kemudian membentuk data *balanced panel* dengan total 110 observasi.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Variabel dependen:

1) PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu (BPS, 2023b). BPS (2023b)

juga mendefinisikan PDRB sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB per kapita dalam kajian ini mengacu pada PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 karena menyajikan PDRB per kapita riil dalam data panel (antar waktu dan antar wilayah) dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga (IMF, 2009). Penggunaan PDRB per kapita ADHK juga diterapkan dalam model pertumbuhan ekonomi Altuzarra dkk. (2021).

Variable of interest:

- 1) Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG adalah indeks yang menggambarkan seberapa besar kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) akibat ketimpangan gender (BPS, 2023a).
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui partisipasi perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan melalui posisi dan jabatan sebagai tenaga profesional, serta di bidang ekonomi melalui kontribusi pendapatan perempuan (BPS, 2023a).
- 3) Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (RTPAK). RTPAK adalah perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki. TPAK

sendiri merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tergolong dalam angkatan kerja (BPS, 2023a).

Variabel kontrol:

- 1) Rasio Angka Harapan Hidup (RAHH). RAHH adalah rasio antara Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan dan laki-laki (BPS, 2023a).
- 2) Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RRLS). RRLS adalah rasio antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan laki-laki (BPS, 2023a).
- 3) Rasio Pengeluaran Riil Per Kapita (RPengeluaran). RPengeluaran adalah rasio antara pengeluaran riil per kapita perempuan dan laki-laki (BPS, 2023a).
- 4) Dummy Status Daerah Tertinggal (0: Tidak Tertinggal; 1: Tertinggal). Penetapan daerah tertinggal berpedoman pada Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal (BPK, 2015).

Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam kajian ini meliputi analisis secara deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan kuadran untuk menggambarkan kondisi PDRB per kapita serta hubungannya dengan ketimpangan gender. Sedangkan, analisis inferensia dilakukan dengan menggunakan regresi data panel untuk menganalisis bagaimana pengaruh ketimpangan gender terhadap PDRB per kapita.

Ketimpangan gender dalam penelitian ini diwakili secara umum oleh variabel IKG, dan secara spesifik menurut dimensi-dimensinya melalui variabel IDG dan RTPAK. Penelitian ini memakai regresi data panel yang diolah dengan aplikasi *eviews*.

Penggunaan regresi data panel dalam penelitian dapat mengatasi kendala heterogenitas individu, menyajikan data yang lebih informatif, meminimalkan masalah kolinieritas antar variabel, mengatasi masalah variabel yang terabaikan (*omitted variable*), menghasilkan derajat bebas (*degree of freedom*) yang lebih besar, serta mampu menangkap perubahan yang bersifat dinamis (*dynamics of adjustment*) (Baltagi, 2008). Model regresi penelitian ini dikembangkan dari model Altuzarra dkk. (2021) dan model Gelard dan Abdi (2016). Altuzarra dkk. (2021) mengembangkan model penelitian khusus untuk menganalisis pengaruh berbagai dimensi ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan negara berkembang. Model ini juga memberikan acuan untuk menambahkan variabel kontrol *dummy* daerah tertinggal agar dapat menangkap perbedaan karakteristik spesifik wilayah tertinggal. Sementara itu, penggunaan IKG dalam model ini diadopsi dari model Gelard dan Abdi (2016). Model tersebut menjadi rujukan dalam menambahkan beragam variabel kontrol untuk *robustness check*. Kedua model tersebut saling melengkapi dan dielaborasi dalam 2 persamaan utama

untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap PDRB per kapita kabupaten/kota di NTT. Model (1) mengestimasi pengaruh ketimpangan gender (IKG) secara umum terhadap PDRB per kapita.

$$\begin{aligned} \text{LogPDRB_Kapita}_{it} = & (\alpha + \mu_i) + \beta_1 \text{IKG}_{it} + \\ & \beta_2 \text{RAHH}_{it} + \beta_3 \text{RRLS}_{it} + \\ & \beta_4 \text{RPengeluaran}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1) \end{aligned}$$

Model (2) mengestimasi ketimpangan gender menurut dimensi pemberdayaan (IDG) dan dimensi partisipasi ekonomi (RTPAK). Model (3) mengakomodasi RAHH, RRLS, dan Rpengeluaran. Model (4) mengakomodasi status daerah tertinggal.

$$\begin{aligned} \text{LogPDRB_Kapita}_{it} = & (\alpha + \mu_i) + \beta_1 \text{IDG}_{it} + \\ & \beta_2 \text{RTPAK}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LogPDRB_Kapita}_{it} = & (\alpha + \mu_i) + \beta_1 \text{IDG}_{it} + \\ & \beta_2 \text{RTPAK}_{it} + \beta_3 \text{RAHH}_{it} + \\ & \beta_4 \text{RRLS}_{it} + \\ & \beta_5 \text{RPengeluaran}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LogPDRB_Kapita}_{it} = & (\alpha + \mu_i) + \beta_1 \text{IDG}_{it} + \\ & \beta_2 \text{RTPAK}_{it} + \beta_3 \text{RAHH}_{it} + \\ & \beta_4 \text{RRLS}_{it} + \\ & \beta_5 \text{RPengeluaran}_{it} + \\ & \beta_6 \text{Tertinggal}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4) \end{aligned}$$

Keterangan:

LogPDRB_Kapita: Logaritma PDRB per Kapita

i : kabupaten/kota di NTT

t : tahun 2018-2022

β_k : koefisien regresi
($k=1,2,3,4,5,6$)

$(\alpha + \mu_i)$: efek spesifik kabupaten/kota

ε_{it} : residual model untuk kabupaten ke *i* pada tahun ke *t*

IKG : Indeks Ketimpangan Gender

IDG : Indeks Pemberdayaan Gender

RTPAK : Rasio Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja
 RAHH : Rasio Angka Harapan Hidup
 RRLS : Rasio Rata-rata Lama Sekolah
 RPengeluaran: Rasio Pengeluaran Riil
 Per Kapita
 Tertinggal: *Dummy* Status Daerah
 Tertinggal (0: Tidak
 Tertinggal; 1: Tertinggal)

Pemilihan model terbaik untuk seluruh model penelitian ini menggunakan uji formal, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan hasil kedua uji tersebut, diketahui bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik untuk mengestimasi pengaruh ketimpangan gender terhadap PDRB per Kapita pada seluruh model tersebut. Wooldridge (2012) menegaskan bahwa FEM efektif mengatasi masalah *omitted variable bias* atau variabel-variabel terkait lainnya yang tidak termasuk dalam model, sehingga FEM lebih tepat dibandingkan *Random Effect Model* (REM) untuk analisis kebijakan yang menggunakan data agregat. Wooldridge (2012) juga menyarankan menggunakan FEM karena pada penelitian level geografis (negara, provinsi, dan kabupaten), FEM mengakomodasi *unobserved unit effect* a) sebagai *intercept* yang terpisah untuk estimasi setiap *unit cross-section*.

Metode estimasi yang tepat untuk FEM ditentukan setelah pengujian struktur varians-kovarians residual. Uji *Lagrange Multiplier (LM test)* menunjukkan struktur varians-kovarians residual bersifat heteroskedastis. Setelah itu, uji *cross-sectional correlation* (λ LM

test) menunjukkan bahwa struktur varians-kovarians residual bersifat heteroskedastis dan terdapat *cross-sectional correlation* baik pada model (1) maupun model (2). Oleh karena itu, metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Feasible Generalized Least Square* atau FGLS (Greene, 2012).

Uji asumsi klasik, seperti homoskedastisitas dan non-autokorelasi, tidak dapat diterapkan pada estimator FGLS karena konsep pengujian asumsi klasik tersebut tidak relevan dalam konteks regresi OLS. Meskipun demikian, pengujian normalitas dan multikolinieritas tetap perlu dilakukan (Ekananda, 2016). Uji normalitas (uji Jarque-Bera) pada Tabel 2 menunjukkan bahwa residual dari seluruh model memiliki distribusi normal (nilai Probabilitas Jarque Bera lebih dari level α yang ditetapkan). Sementara itu, model dalam penelitian ini juga tidak melanggar asumsi non-multikolinieritas karena korelasi antar variabel bebas kurang dari 90 persen (Ghozali, 2013).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Ketimpangan Gender dan PDRB per Kapita

Tabel 1 menunjukkan bahwa kabupaten/kota di NTT memiliki rata-rata PDRB per kapita riil selama tahun 2018-2022 sebesar Rp 11.968.000. Meskipun demikian, terdapat deviasi PDRB per kapita yang cukup besar antar

kabupaten/kota di NTT, dimana PDRB per kapita terbesar dimiliki oleh kota Kupang dan terkecil dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat Daya. Sementara itu, rata-rata IKG kabupaten/kota di NTT adalah 0,54 dengan deviasi yang cukup besar.

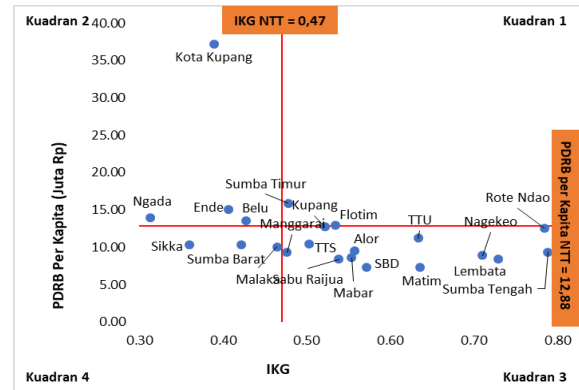
Tabel 1. Statistik Deskriptif

	PDRB per Kapita (Ribuan Rp)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (RTPAK)	Rasio Angka Harapan Hidup (RAHH)	Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)	Rasio pengeluaran (RPengeluaran)
Mean	11.968	0,54	60,33	0,77	1,06	0,92	0,70
Median	10.320	0,51	59,38	0,77	1,06	0,92	0,68
Max	38.327	0,85	81,28	0,90	1,06	1,08	1,02
Min	6.483	0,26	47,20	0,59	1,06	0,83	0,45
Std. Dev.	6.052	0,14	7,38	0,07	0,00	0,05	0,15
obs	110	110	110	110	110	110	110

Sumber: Output pengolahan *evIEWS*

Tingkat ketimpangan gender kabupaten/kota di NTT ini lebih besar dibandingkan IKG Indonesia (0,48). Hal ini tidak terlepas dari kondisi rata-rata tingkat pemberdayaan gender kabupaten/kota di NTT sebesar 60,33 dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki sebesar 0,77.

Untuk mengetahui hubungan antar variabel, maka dilakukan *plotting* dalam analisis kuadran. Gambar 2, menunjukkan hubungan negatif antara ketimpangan gender dan PDRB per kapita. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Pertiwi dkk., 2021; Altuzarra dkk., 2021) bahwa ketimpangan gender berhubungan negatif dengan PDRB per kapita.



Gambar 2. Sebaran kabupaten/kota di NTT berdasarkan rata-rata IKG dan PDRB per Kapita, 2018-2022

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

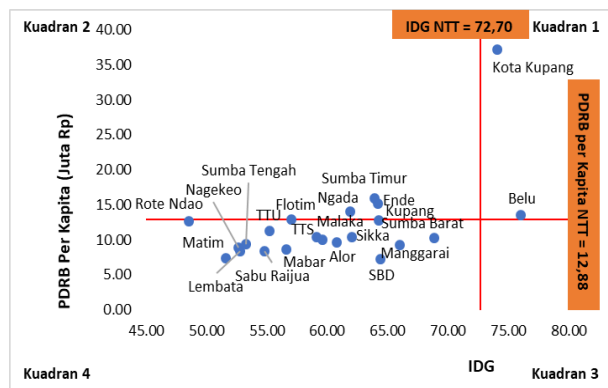
Analisis kuadran yang dilakukan menggunakan angka provinsi NTT untuk memetakan sebaran kabupaten/kota pada empat kuadran, sehingga kabupaten/kota pada kuadran 1 dan 2 memiliki nilai PDRB per kapita yang tinggi (lebih besar dari angka provinsi NTT), begitupun sebaliknya di kuadran 3 dan 4. Sementara itu, kabupaten/kota pada kuadran 1 dan 3 memiliki nilai IKG yang tinggi (lebih besar dari angka provinsi NTT), begitupun sebaliknya di kuadran 2 dan 4.

Kabupaten/kota di Kuadran 2 cenderung memiliki ketimpangan gender yang rendah dan PDRB per kapita yang tinggi, diantaranya Kota Kupang, Ngada, Ende, dan Belu. Sebaliknya, kabupaten/kota di Kuadran 3 cenderung memiliki ketimpangan gender yang tinggi dan PDRB per kapita yang rendah. Adapun kabupaten/kota di Kuadran 4 yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sikka, dan Malaka cenderung

memiliki ketimpangan gender yang rendah dan memiliki PDRB per kapita yang rendah. Hasil ini mengindikasikan kondisi hubungan positif antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, Kabupaten Sumba Timur pada Kuadran 1 memiliki ketimpangan gender yang tinggi, namun memiliki PDRB per kapita yang tinggi pula.

Gambaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Gambar 3, kuadran 1 menunjukkan hanya Kota Kupang dan Kabupaten Belu yang memiliki nilai IDG di atas angka provinsi NTT. Kabupaten/kota tersebut memiliki PDRB per kapita dan tingkat pemberdayaan perempuan yang tinggi.



Gambar 3. Sebaran kabupaten/kota di NTT berdasarkan rata-rata IDG dan PDRB per Kapita, 2018-2022

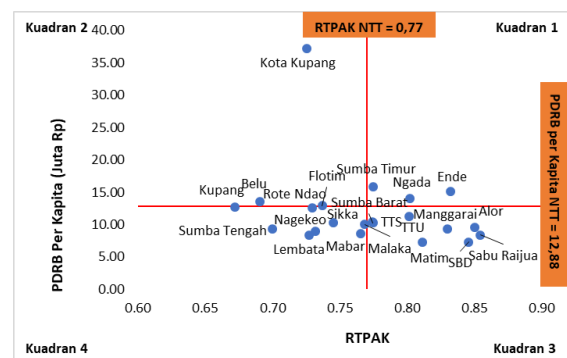
Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Sebaliknya, sebagian besar kabupaten/kota di NTT masuk dalam Kuadran 4, yaitu kondisi dimana tingkat

pemberdayaan perempuan dan PDRB per kapita rendah. Hal ini berarti tingkat pemberdayaan perempuan di Provinsi NTT masih rendah. Hal ini juga menggambarkan hubungan positif antara tingkat pemberdayaan perempuan dan PDRB per kapita. Kondisi ini serupa dengan temuan penelitian Nazmi & Jamal (2018) dan Altuzarra dkk. (2021). Adapun Kabupaten Sumba Timur, Ngada, dan Ende pada Kuadran 2 memiliki pemberdayaan perempuan yang rendah, namun memiliki PDRB per kapita yang tinggi.

Gambaran TPAK dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis kuadran pada Gambar 4, kabupaten/kota di NTT sebagian besar berada di Kuadran 4 dan 2. Artinya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di NTT secara umum lebih rendah dari laki-laki



Gambar 4. Sebaran kabupaten/kota di NTT berdasarkan rata-rata RTPAK dan PDRB per Kapita, 2018-2022

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Kabupaten/kota pada Kuadran 4 menunjukkan TPAK perempuan yang rendah, seiring dengan PDRB per kapita yang juga rendah. Sementara itu, kabupaten/kota di Kuadran 1, seperti Kabupaten Sumba Timur, Ngada, dan Ende, memiliki TPAK perempuan yang tinggi meskipun PDRB per kapita mereka tetap rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang mengungkapkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih tinggi berkaitan positif dengan pertumbuhan ekonomi (Deris dkk., 2022; Kucera, 2002; Egbulonu & Eleonu, 2018).

Adapun beberapa kabupaten/kota di Kuadran 3 diantaranya Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai, Alor, Sabu Raijua, Sumba Barat, Manggarai Timur, dan Sumba Barat Daya memiliki TPAK perempuan yang tinggi, namun memiliki PDRB per kapita yang rendah. Temuan ini sejalan dengan Kajian Apire dkk. (2023) terkait pengaruh negatif TPAK perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebabnya adalah konsentrasi tenaga kerja perempuan di sektor-sektor dengan produktivitas rendah seperti pertanian dan ekonomi informal, yang tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Apire dkk., 2023). Fenomena empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung bekerja pada sektor-sektor informal yang tingkat produktivitasnya rendah dan outputnya tidak tercatat dalam statistik ekonomi

seperti sektor jasa, penyediaan akomodasi, dan perdagangan (Kemen-PPPA, 2022). Terakhir, terdapat dua daerah pada Kuadran 2 yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Belu yang memiliki TPAK perempuan yang rendah, namun PDRB per kapitanya tinggi.

3.2 Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap PDRB per Kapita

Model persamaan regresi dalam penelitian ini diuraikan menjadi model yang hanya memasukkan variabel bebas utama yaitu IKG, IDG, RTPAK, RAHH, RRLS, dan rasio pengeluaran riil per kapita (model 1, 2, dan 3), serta model yang menambahkan indikator daerah tertinggal sebagai variabel kontrol (model 4). Secara umum, Tabel 2 menunjukkan bahwa indikator-indikator ketimpangan gender dalam model ini secara simultan signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita daerah di Provinsi NTT. Variabel-variabel tersebut juga mampu menjelaskan sekitar 99 persen dari variasi PDRB per kapita.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB per kapita semua daerah di Provinsi NTT signifikan dipengaruhi oleh ketimpangan gender (model 1). Peningkatan satu satuan ketimpangan gender akan menurunkan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar -12,54 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian Altuzarra dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender yang tinggi dapat secara

signifikan menghambat pertumbuhan PDRB per kapita.

Tabel 2. Hasil Regresi Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap PDRB Per Kapita

Variabel	Log_PDRB Per Kapita			
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
IKG	-0.1254 **			
IDG		0.0026 *	0.0022 **	0.0021
RTPAK		0.3200 *	0.3009 *	0.2917 *
RAHH	-2.9984		-3.4066	-1.4395
RRLS	0.2936 *		0.2044 **	0.1900
RPengeluaran	2.7549 *		2.4463 *	2.3246 *
Tertinggal				-0.0113
Constant	10.3578 * (3,7673)	8.9132 * (0,0831)	10.6596 * (2,9552)	8.6939 * (3,2194)
Obs	110	110	110	110
Regency FE	Ya	Ya	Ya	Ya
R-squared	0.9942	0.9949	0.9962	0.9962
Jarque-Bera	5.6801	4.5878	2.9989	3.2097
F-Statistics	579.3136 *	731.0143 *	826.1506 *	806.4549 *

Keterangan

*Signifikan pada level 5%; **Signifikan pada level 10%

Nilai dalam tanda kurung adalah koefisien standar error.

Sumber: Output pengolahan *Eviews*

Demikian pula, penelitian Pertiwi dkk. (2021) membuktikan bahwa ketimpangan gender yang tinggi secara signifikan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Sementara itu, peningkatan satu satuan IDG (pada model 2 dan 3) dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 0,22 dan 0,26 persen. Peningkatan tingkat pemberdayaan gender secara signifikan mendorong peningkatan pertumbuhan PDRB per kapita di seluruh daerah di Provinsi NTT.

Indikasi pengaruh negatif IKG dan pengaruh positif IDG terhadap PDRB per kapita telah ditunjukkan sebelumnya oleh kuadran hubungan antar variabel tersebut. Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3, terlihat bahwa semakin rendah tingkat ketimpangan gender dan semakin tinggi tingkat pemberdayaan gender suatu daerah, maka PDRB per kapita daerah tersebut cenderung semakin tinggi. Kota Kupang dan Kabupaten Belu, yang memiliki IKG rendah dan IDG tinggi, termasuk daerah dengan PDRB per kapita yang tinggi di NTT. Sebaliknya, Kabupaten Lembata, Manggarai Timur, dan Sumba Tengah, yang memiliki IKG tinggi dan IDG rendah, memiliki PDRB per kapita yang rendah.

Dari Tabel 2 diketahui bahwa ketimpangan gender dalam aspek partisipasi kerja, pendidikan, dan ekonomi signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita. Dari aspek partisipasi kerja, diketahui bahwa peningkatan rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki (model 2, 3, dan 4) signifikan meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita. Dengan kata lain, kesetaraan partisipasi angkatan kerja dapat mendorong pertumbuhan PDRB per kapita. Hal ini sejalan dengan penelitian Deris & Nuryadin (2022) dan Arifin (2020) yang menggunakan data pertumbuhan ekonomi 34 Provinsi di Indonesia. Begitupun dengan penelitian Chaudhry (2007) yang melakukan penelitian di Pakistan dan penelitian Egbulonu & Eleonu (2018) yang melakukan penelitian di Nigeria.

Dari aspek pendidikan, diketahui bahwa kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan rasio RLS memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita. Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Deris & Nuryadin, 2022; Arifin, 2020; Kucera, 2002). Sementara itu, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi (Gelard & Abdi, 2016), di negara berkembang (Altuzarra dkk., 2021), serta di Nigeria (Egbulonu & Eleonu, 2018). Penelitian Atiq & Qadri (2021) di negara-negara Asia membuktikan bahwa hubungan kesenjangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan hanya di jenjang pendidikan dasar, sementara di jenjang pendidikan menengah memiliki hasil yang signifikan. Aspek ekonomi menunjukkan bahwa kesetaraan pengeluaran antara laki-laki dan perempuan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita.

Adapun kesetaraan tingkat harapan hidup tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita. Penelitian Deris & Nuryadin (2022) dan Arifin (2020) menunjukkan hasil yang sama bahwa RAHH tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Gelard & Abdi (2016) juga menemukan hasil negatif atau tidak signifikan antara

kesenjangan harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi di 14 negara dengan nilai IPM yang tinggi.

4. Simpulan dan Saran

Kabupaten/kota di NTT dengan ketimpangan gender yang semakin tinggi relatif memiliki PDRB per kapita yang semakin rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita daerah di NTT. Dengan kata lain, semakin tinggi ketimpangan gender, semakin besar pula hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di NTT. Jika dilihat menurut aspeknya, ketimpangan gender dalam aspek partisipasi kerja, pendidikan, dan ekonomi signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita. Dengan kata lain, peningkatan proporsi partisipasi angkatan kerja perempuan, tingkat pendidikan perempuan, dan daya beli perempuan mendorong pertumbuhan PDRB per kapita daerah di NTT.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di NTT dengan meningkatkan kesetaraan gender membutuhkan peran pemerintah dan berbagai *stakeholder* dalam menyusun kebijakan yang berfokus pada peningkatan pendidikan, kesempatan kerja, dan Keikutsertaan perempuan dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, pemerintah harus merancang kebijakan inklusif yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan bagi anak perempuan melalui penyediaan

beasiswa dan menjamin sekolah wajib hingga usia tertentu. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja dengan menyediakan dana abadi untuk pelatihan, bantuan keuangan dan akses pasar bagi perempuan pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah harus menjadi mediator ketimpangan gender akibat norma adat dan budaya, terutama di perdesaan, yang membuat banyak perempuan tidak memiliki hak atas tanah sehingga mempersulit perempuan mengakses kredit perbankan untuk usaha.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan penelitian ini, baik dari aspek cakupan indikator yang dianalisis maupun metodologi yang digunakan. Dari aspek cakupan indikator, penelitian berikutnya diharapkan melakukan disagregasi semua indikator IKG agar analisis yang dihasilkan lebih spesifik. Selain itu, dari aspek metodologi yang digunakan, penelitian berikutnya disarankan dapat menggunakan model regresi spasial untuk mengakomodasi adanya efek spasial.

5. Daftar Pustaka

- Altuzarra, A., Gálvez-Gálvez, C., & González-Flores, A. (2021). *Is gender inequality a barrier to economic growth? A panel data analysis of developing countries. Sustainability, 13(1), 367.*
- Apiro, J. P., Turyareeba, D., Olyanga, M. A., Katutsi, V. P., Musiita, B., & Wamala, A. (2023). *Female Labor Force Participation and Uganda's Economic Growth. Journal of Economics and Behavioral Studies, 15(4 (J)), 55-68.*
- Arifin, S. (2020). Kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kajian, 23(1), 27-42.*
- Atiq, F., & Qadri, F. S. (2021). *Does Gender Inequality Affect Economic Growth. Empirics from Asian Countries. IJWE, 7(1).*
- Bali moune-Lutz, M. (2007). *Globalisation and gender inequality: Is Africa different?. Journal of African Economies, 16(2), 301-348.*
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data* (Vol. 4, pp. 135-145). Chichester: Wiley.
- Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). *International measures of schooling years and schooling quality. The American Economic Review, 86(2), 218-223.*
- BKF (Badan Kebijakan Fiskal). (2022). Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah. Jakarta: Kemenkeu.
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). (2015). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Jakarta: BPK
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023a). Indeks Ketimpangan Gender 2022, Volume 1 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2018-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023c). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS NTT (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur). (2023). *Berita Resmi Statistik No. 42/08/53/Th. XXVI, 1 Agustus 2023: Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2022*. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang: BPS NTT.
- Busse, M., & Spielmann, C. (2006). *Gender inequality and trade. Review of International Economics, 14(3), 362-379*.
- Cabeza-García, L., Del Brio, E. B., & Oscanoa-Victorio, M. L. (2018). *Gender factors and inclusive economic growth: The silent revolution. Sustainability, 10(1), 121*.
- Chaudhry, I. S. (2007). *Gender inequality in education and economic growth: case study of Pakistan. Pakistan Horizon, 60(4), 81-91*.
- Deris, L. R. V., Bhinadi, A., & Nuryadin, D. (2022). Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (34 provinsi) tahun 2015-2020. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(12), 2947-2958*.
- Dollar, D., & Gatti, R. (1999). *Gender inequality, income, and growth: are good times good for women?* (Vol. 1). Washington, DC: Development Research Group, The World Bank.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2003). Institutions, trade, and growth. *Journal of monetary economics, 50(1), 133-162*.
- Egbulonu, K. G., & Eleonu, I. S. (2018). Gender inequality and economic growth in Nigeria (1990–2016). *International Journal of Gender and Women Studies, 6(1), 159-167*.
- Ekananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel. Edisi ke-2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gelard, P., & Abdi, A. (2016). *Evaluating the effect of gender inequality on economic growth in countries with high human development index. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 4(1(s)), pp-1714*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS (7th ed.)*. Universitas Diponegoro.
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis (7th ed.)*. Boston, MA: Pearson Education
- IMF (International Monetary Fund). (2009). *System of National Accounts 2008*. New York: United Nations.
- Jayasuriya, D. S., & Burke, P. J. (2013). Female parliamentarians and economic growth: Evidence from a

- large panel. *Applied Economics Letters*, 20(3), 304-307.
- Kemen-PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). (2023). *Profil Perempuan Indonesia 2022*. Jakarta: Kemen-PPPA
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). *The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: new evidence for a panel of countries*. *Feminist economics*, 15(3), 91-132.
- Kucera, D. (2002). *The effects of wealth and gender inequality on economic growth: A survey of recent empirical studies*. *IILS Working Paper No. 136*.
- Nazmi, L., & Jamal, A. (2018). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 740-750.
- Pertiwi, U. E., Heriberta, H., & Hardiani, H. (2021). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(2), 69-76.
- Swamy, A., Knack, S., Lee, Y., & Azfar, O. (2001). Gender and corruption. *Journal of development economics*, 64(1), 25-55.
- UNDP (*United Nations Development Programme*). (2023). *Gender Social Norms Index (GSNI): Tackling Social Norms: Breaking down gender biases: Shifting social norms towards gender equality*.
- United Nations. (2015). *The Millennium Development Goals Report 2015*. United Nations: New York, USA.
- Woetzel, J., Madgavkar, A., Sneader, K., Tonby, O., Lin, D. Y., Lydon, J., & Gubieski, M. (2018). *The power of parity: advancing women's equality in Asia pacific*. *Shanghai: The McKinsey Global Institute Report*.
- Wooldridge, J. M. (2012). *Introductory econometrics: a modern approach (upper level economics titles)*. *Southwestern College Publishing, Nashville, T ATN, 41, 673-690*.
- World Bank. (2020). *Gender for Development: Closing The Gap To Boost Growth*.
- Yildiz, E. (2016). *The Importance of Women in Sustainable Development*. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 5(1), 1-10.